

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu potensi terbesar yang dimiliki Indonesia adalah tersedianya sumber daya manusia yang melimpah. Sumber daya yang melimpah apabila dikembangkan secara optimal akan mampu mewujudkan tenaga-tenaga yang profesional dibidangnya masing-masing sebagai salah satu syarat tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik wanita maupun pria ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi wanita dan pria itu sendiri. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak wanita belum mempunyai manfaat secara optimal sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang maksimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas Sumber Daya Manusia secara penuh (Tjokrowinoto, 1998:34)

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi juga dapat menjadi beban dalam proses pembangunan jika penduduknya berkualitas rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan dalam menangani permasalahan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian diharapkan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar merata diseluruh wilayah sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata (BPS, 2005:1)

Sekitar tiga seperempat penduduk Indonesia termasuk di dalam batas usia kerja.

tahun. Angkatan kerja Indonesia tahun 2005 sekitar 69,83 persen dari jumlah penduduk. Jumlah angkatan kerja tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah penduduk, bahkan juga dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja karena dominasi penduduk usia muda dalam struktur kependudukan. Angkatan kerja yang tumbuh yang sangat cepat akan membawa beban sendiri bagi perekonomian, yaitu penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja (tambahan permintaan tenaga kerja lebih sedikit daripada penawaran angkatan kerja), maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah ada. Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Dumairy, 1996:68)

Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia berkisar pada angka 51,63 persen. Dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2005 kenaikan angka tidak berarti, 46,28 persen pada tahun 2003 dan 49,23 persen pada tahun 2005. Jika diingat bahwa penduduk dalam usia muda masih dominan, kenaikan angka-angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini masih sangat kecil. Berarti manakala penduduk usia muda (15 tahun) bertambah umur sehingga memasuki batas usia kerja, sebagian besar mereka tidak masuk ke golongan tenaga kerja yang angkatan kerja, melainkan ke golongan bukan angkatan kerja. Boleh jadi mereka melanjutkan sekolah, bagi wanita mengurus rumah tangga atau menganggur (BPS, 2005:27).

Tingkat partisipasi angkatan kerja pria masih jauh lebih tinggi daripada tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Perbandingan angkanya untuk tahun 2005 adalah 51,63 persen berbanding dengan 84,94 persen. Ini mencerminkan peluang tenaga kerja wanita untuk terlibat di pasar tenaga kerja masih rendah. Lebih tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pria daripada wanita tidak hanya berlaku untuk Indonesia secara

daerah pemukiman. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pria lebih tinggi daripada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita baik di pedesaan maupun perkotaan.

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pria dan Wanita tahun 2003-2005 (persen)

TPAK	2003	2004	2005
Pria	85,33	86,03	84,94
Wanita	46,28	49,23	51,63

Sumber: Sakernas, 2005

Tabel diatas merupakan salah satu data yang menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terdapat ketimpangan antar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pria dan wanita khususnya dalam hal kesempatan dan peluang mengembangkan diri secara optimal dalam dunia ketenaga kerjaan.

Jumlah penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, baik penduduk laki-laki maupun wanita. Pada tahun 2003 penduduk propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 3.207 ribu jiwa dan pada tahun 2004 naik menjadi 3.221 ribu jiwa. Pada tahun 2005 juga mengalami kenaikan menjadi 3.281,8 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan propinsi-propinsi di Pulau Jawa dan Bali, maupun rata-rata Indonesia, laju pertumbuhan penduduk Propinsi Daerah Istimewa

...

Tabel 1.2
Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun menurut Propinsi di Pulau Jawa dan Bali, tahun 1980-2005 (persen)

Provinsi	1980 – 1990	1990 – 2000	2000 – 2005
DKI Jakarta	2,38	0,17	2,04
Jawa Barat	2,57	2,03	2,56
Jawa Tengah	1,17	0,94	2,25
D. I. Yogyakarta	0,57	0,72	1,36
Jawa Timur	1,08	0,70	2,80
Banten	-	-	4,10
Bali	1,18	1,31	3,15
Indonesia	1,97	1,49	2,25

Sumber : Statistik Indonesia 2005, BPS – Jakarta

Baik laki-laki maupun perempuan adalah sumber daya manusia potensial yang memiliki kesempatan dan peluang sama untuk mengembangkan diri secara optimal dalam segala aspek pembangunan. Misalnya pendidikan, sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Artinya bahwa pria dan wanita juga memiliki kesempatan yang sama dalam hal perencanaan pembangunan (terutama dalam pengambilan keputusan) dan pemilikan akses dalam menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri, demikian juga dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Akan tetapi apabila kita melihat data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tiga tahun terakhir, di 5 kabupaten Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita selalu rendah

... ..

Tabel 1.3
TPAK menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I Yogyakarta
berdasarkan Jenis Kelamin (persen)

Kabupaten	2003		2004		2005	
	P	W	P	W	P	W
Bantul	81,41	59,94	81,95	60,45	80,91	57,35
Kulon Progo	82,75	65,86	85,98	66,25	81,56	64,85
Gunung Kidul	88,17	71,39	88,87	69,70	82,89	58,20
Sleman	65,64	54,94	65,44	54,84	63,67	53,87
Yogyakarta	67,18	52,45	67,85	54,57	66,25	52,89

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2005

Dalam tiga tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita selalu rendah dengan pria. Pada tahun 2004 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita dan pria sempat mengalami kenaikan tapi di tahun 2005 terjadi penurunan. Kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pencari kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada.

Penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas yang bekerja selalu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk wanita yang bekerja. Secara umum laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, sehingga hampir semua laki-laki yang telah mencapai usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Sampai tahun 2005, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wanita di kabupaten Kulon Progo masih yang tertinggi, yaitu sebesar 64 persen. Dan yang terendah adalah di kota Yogyakarta yaitu 52,89 persen.

Pada dasarnya ada dua pendapat yang berbeda mengenai status ekonomi wanita yang rendah. Pertama, kerniskinan wanita dianggap sebagai penyebab status ekonomi mereka yang rendah. Asumsinya ialah apabila kaum wanita miskin ini mempunyai

mereka keluar dari kemiskinan. Kedua, menganggap bahwa status ekonomi wanita yang rendah diartikan sebagai tidak masuknya peran wanita secara utuh sebagai “sumber daya manusia” dalam ekonomi. Penyebabnya ialah rendahnya pendidikan, manajemen waktu yang tidak cukup dan kegiatan produktif yang tidak efisien.

Rendahnya ekonomi wanita memang menjadi fenomena tersendiri pada saat ini. Adanya pembatasan budaya yang diciptakan oleh masyarakat membuat kaum wanita tidak sebebas laki-laki dalam memilih dan mencari pekerjaan. Pembatasan kebudayaan yang masih kuat adalah pendapat masyarakat agar kaum wanita dalam memilih dan mencari pekerjaan tidak melanggar kodrat mereka sebagai perempuan. Pembatasan budaya yang lain adalah persepsi bahwa wanita dan laki-laki itu memiliki kemampuan yang berbeda, wanita masih dianggap mempunyai kemampuan fisik maupun intelektual yang lebih rendah dibanding dengan laki-laki (Fakih, 1998:208).

Hal ini pula yang kemudian memberi andil bagi rendahnya ekonomi wanita. Di satu sisi wanita Indonesia dituntut untuk mampu berperan diluar rumah (publik) tetapi di sisi lain muncul pula tuntutan lain agar wanita tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan yaitu sebagai ibu yang mampu mengurus anak-anaknya dan suami serta mampu menciptakan suasana yang nyaman dalam keluarga (domestik). Situasi dilematis ini banyak dihadapi oleh kaum wanita di Indonesia khususnya mereka yang tinggal di pedesaan dimana masih kuat menganut nilai-nilai budaya *patriarchat*.

Berdasarkan data dan fakta diatas, menunjukkan bahwa penduduk wanita masih tertinggal dibandingkan dengan kaum pria. Terutama dibidang ekonomi. Padahal, merupakan hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sama.

Sehingga penulis ingin menganalisis permasalahan utama rendahnya perekonomian wanita di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, Yogyakarta

Patriarki merupakan salah satu budaya masyarakat yang sampai saat ini masih dianggap sebagai budaya yang mengakibatkan keterbelakangan bagi kaum wanita pada masa kini. Penulis menganalisisnya dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1975-2005”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan variabel dependennya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, variabel independennya adalah jumlah penduduk yang sekolah, tingkat upah, tingkat pengangguran dan tingkat fertilitas. Kurun waktu yang digunakan yaitu tahun 1975-2005.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa masalah yang akan menjadi bahan analisis yaitu:

1. Apakah jumlah penduduk wanita yang sekolah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY pada tahun 1975-2005 ?
2. Apakah tingkat upah tenaga kerja wanita berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY pada tahun 1975-2005 ?
3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY pada tahun 1975-2005 ?
4. Apakah tingkat fertilitas berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY tahun 1975-20

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk wanita yang sekolah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY tahun 1975-2005.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat upah tenaga kerja wanita terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY tahun 1975-2005.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY tahun 1975-2005.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat fertilitas terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di propinsi DIY tahun 1975-2005.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya kaum wanita demi tercapainya tingkat perekonomian daerah yang lebih maksimal.